

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badan Legislasi. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.

Eddyono, Supriyadi Widodo, et.al. Masukan Terhadap Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2014.

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

_____. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Hanitijo Soemitro, Ronny. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.

Hendrawan, Budi. Struktur dan Karakteristik KUHP. Pustaka Belajar, 2021.

Heroepoetri, A. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum. Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2015.

Jamil, Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Lamintang, P., Lamintang, T. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan (Ed2, Cet 1). Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marpaung, L. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Marzuki, Suparman. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995.
- Muhammad, Husei. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: BKKBN, 2011.
- Muladi, Kapita Selekt. *Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mukarramah, *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1982.
- Soedjono. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Prakoso, Djoko. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Nusamedia, 2020.

Prints, Darwan. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Puspa, Yan P. Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

JURNAL

Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia,” *Lex Crimen IV*, no. 1, (2015).

Efren Nova, Edita Elda, “Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidaka Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 5 (2), (2022).

Prianter Jaya Hairi, dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal DPR RI*, (2023).

Faizal Adi Surya, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online di Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, (2022).

Luh Made Khristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Media Iuris* 4, no. 2, (2021).

Novitasari, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Vol.2, No.3, (2020).

Purwanti, Ani.,& Hardiyanti, Marzellina, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui

- RUU Kekerasan Seksual”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, (No. 2), (2018).
- Raissa Lestari, Implementasi Konvensin Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015), JOM FISIP, Vol 4 (2), (2017).
- Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan anak dalam perspektif hukum Nasional, Lex Jurnalica, Vol.12 No. 3, (2015).
- Ridqi Aditya, dkk, “Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, Journal of Social Community, Vol.9, No.2, (2024).
- Saristha Natalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” Lex Crimen II, no. 2, (2013).
- Susiana, S., “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Ruang Publik”. Jurnal info singkat kesejahteraan sosial, 4, (2012).
- Utami Zahirah Noviani, dkk, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* UU No.35 tahun 2014 *jo.* UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Menjadi Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

INTERNET

Afra, H, Kekerasan Anak Indonesia Capai 15.267 Kasus di 2024. Diakses pada 14 Oktober 2024, dari <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>

Children's rights movement. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, dari <http://www.childrensrightswales.org.uk/history-ofchildren-rights.aspx>

Data Perlindungan Anak. Diakses pada 12 Mei 2025, dari <https://bankdata/kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>

Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. Diakses pada 24 Agustus 2025, dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>

Komnas Perempuan, Memutus Rantai Kekerasan dan Memulihkan Korban. Diakses pada 24 Agustus 2025, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-17-tahun-pengesahan-uu-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pkdrj-jakarta-27-september-2021>

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. Diakses pada 30 Juni 2025, dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>

KBBI, Korban. Diakses pada 2 Mei 2025, dari <https://kbbi.web.id/korban>

KBBI, Restitusi. Diakses pada 2 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restitusi>

Siti Rubaidah, Sepuluh Tahun UU PDKRT. Diakses pada 24 Agustus 2025, dari <https://www.jurnalperempuan.org/blog/sepuluh-tahun-uu-pkdrj>

WHO, *O.One health.World Health Organization*. Diakses pada 24 Agustus 2025, dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>

KARYA TULIS

Douglas Napitupulu. Tesis: “Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan”. Medan: Universitas Medan Area, 2013.

Khairunnisa, M. Skripsi: Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Said Agung Sedayu. Skripsi: “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Siti Amira Hanifah. Skripsi: “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*”. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.